

**POTRET PREFERENSI POLITIK PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM  
2024***A PORTRAIT OF THE POLITICAL PREFERENCES OF VOTERS WITH DISABILITIES IN THE  
2024 GENERAL ELECTION***Yayan Sahi\*, Ramli Mahmud, Intan Tiara Kartika, Zulfikar Adjie**

Universitas Negeri Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Gorontalo 96128, Indonesia

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 15 Oktober 2024

Disetujui : 21 Juni 2025

**Keywords:**

political preferences; political participation; voters with disabilities

**Kata Kunci:**

preferensi politik; partisipasi politik; pemilih disabilitas

**\*) Korespondensi:**E-mail: [yayansahi1999@gmail.com](mailto:yayansahi1999@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to analyze the political preferences of voters with disabilities in general elections and the determinants of their political preferences. This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis used an interactive model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study indicate that political preferences are born from values as a basis, perceptions are formed through direct experience and interaction with the political environment, and tendencies are reflected in participation patterns and satisfaction with democratic mechanisms. Political preferences of voters with disabilities are influenced by ideological values formed from educational background, social class, and religious affiliation. While group identity plays a role in strengthening solidarity, forming a sense of attachment, and directing political choices according to the common interest. Political preferences of voters with disabilities are not simply personal choices, but rather the result of the interaction between values, perceptions, and tendencies influenced by ideological values and group identity to strengthen political orientation.

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum dan faktor penentu preferensi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa preferensi politik lahir dari nilai sebagai dasar, persepsi dibentuk melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan politik, serta kecenderungan tercermin dalam pola partisipasi dan kepuasan terhadap mekanisme demokrasi. Faktor preferensi politik pemilih disabilitas dipengaruhi oleh nilai ideologis terbentuk dari latar belakang pendidikan, kelas sosial, dan afiliasi keagamaan, sedangkan identitas kelompok berperan memperkuat solidaritas, membentuk rasa keterikatan, dan mengarahkan pilihan politik sesuai kepentingan bersama. Preferensi politik pemilih disabilitas bukan sekadar pilihan personal, melainkan hasil interaksi antara nilai, persepsi, dan kecenderungan yang dipengaruhi oleh faktor nilai ideologis serta identitas kelompok untuk meneguhkan orientasi politik.

## PENDAHULUAN

Konsensus universal mengenai definisi tunggal tentang politik hingga saat ini belum ada. Pemahaman politik pada hakikatnya berpusat pada pertanyaan mendasar *who gets what, when, and how*, sehingga mustahil ada satu penafsiran final yang dapat mencakup secara keseluruhan (Lasswell, 1963). Keragaman tafsir melahirkan berbagai pendekatan dalam memaknai politik, termasuk pendekatan struktural yang menekankan peran kekuasaan dan institusi formal. Klaim objektivitas dalam pendekatan struktural sering berubah menjadi bias intelektual. Pendekatan struktural dalam dimensi vertikal, cenderung mengabaikan ketimpangan antara pusat dan daerah, serta elite dan masyarakat. Pendekatan struktural dalam dimensi horizontal, sering mengabaikan analisis terhadap hubungan setara antar lembaga negara, partai politik, dan kelompok sosial (Roskin, 2025; Fong et al., 2019). Pemahaman tentang politik seharusnya tidak dibatasi oleh pendekatan tertentu, tetapi dipandang secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kekuasaan dan hubungan sosial.

Keterbatasan pendekatan struktural dalam menganalisis ketimpangan politik tercermin pada praktik demokrasi modern, khususnya penyelenggaraan pemilu. Kompleksitas politik jika sulit didefinisikan secara tunggal, maka pemilu sebagai instrumen utama demokrasi layak untuk dikaji ulang. Demokrasi yang seharusnya sebagai ruang representasi dalam praktiknya sering gagal memenuhi kebutuhan kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas. Pemilu justru memperkuat diskriminasi melalui fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak aksesibel, keterbatasan surat suara *braille*, serta penyajian informasi politik belum inklusif. Kehadiran penerjemah bahasa isyarat belum dapat dianggap menciptakan partisipasi bermakna jika penyandang disabilitas masih diposisikan sebagai pendengar pasif, bukan sebagai pelaku politik yang setara. Ketiadaan figur difabel dalam kontestasi pemilu dapat mengukuhkan representasi simbolik yang kosong. Ketiadaan representasi nyata dari penyandang disabilitas membuat ruang partisipasi politik lebih merefleksikan *das sein* berupa ketidaksetaraan nyata dibandingkan dengan *das sollen* yang menjanjikan kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara (Kharima, 2016; Andriani &

Amsari, 2021; Astuti & Suharto, 2021; Salim, 2015; Mais & Yaum, 2019; Dedi & Sudarmo, 2020; Dwintari, 2021). Demokrasi seharusnya menghadirkan ruang partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas agar terwujud prinsip inklusivitas dalam praktik politik.

Ketidakkampuan mengakumulasi hak inklusivitas dalam pemilu berimplikasi pada menurunnya kualitas partisipasi penyandang disabilitas baik secara aktif maupun pasif. Penurunan partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilu dikarenakan sering berbenturan dengan nilai, persepsi, kecenderungan, dan kepuasan diri sendiri yang dapat membatasi keterlibatan. Kualitas partisipasi yang menurun juga mengakibatkan timbulnya preferensi politik negatif berupa apatisme dan marginalisasi. Partisipasi politik pemilih disabilitas yang menurun tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan (Reher & Evans, 2024). Demokrasi idealnya harus memuat pengendalian publik atas keputusan pemerintah, jaminan inklusivitas, serta partisipasi dan distribusi kekuasaan yang setara (Puspitasari, 2004). Demokrasi dan pemilu harus mencerminkan partisipasi, kedaulatan rakyat, serta peran lembaga negara dalam legislatif, yudikatif, dan eksekutif (Widnyani, 2020). Penurunan partisipasi politik penyandang disabilitas menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum memenuhi prinsip inklusivitas dan kesetaraan.

Legitimasi pemilu bergantung pada kemampuan negara menghadirkan demokrasi inklusif. Elit politik seharusnya dapat menjadi perwakilan yang mencerminkan aspirasi seluruh kelompok pemilih, termasuk kelompok marginal (Mariana, 2009). Pemilih disabilitas pada faktanya masih terjebak oleh *stereotip* yang memosisikan sebagai penerima manfaat layanan publik saja, bukan sebagai individu berpotensi untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Rohwerder, 2018; Friedman & Scotch, 2017). *Stereotip* terhadap pemilih disabilitas bertentangan dengan standar internasional pemilu demokratis meliputi kesetaraan suara, non-diskriminasi, independensi penyelenggara, transparansi proses, aksesibilitas, serta penegakan hukum yang kuat (Saihu dkk., 2015). Prinsip negara hukum dalam konteks modern sebagaimana ditegaskan dalam Konferensi *International Commission of Jurists* di Bangkok

pada Tahun 1965 menekankan aspek dinamis seperti perlindungan konstitusional, peradilan independen, pemilu bebas, kebebasan berekspresi, serta kebebasan berserikat (Ridlwan, 2012). Keberhasilan demokrasi diukur dari terwujudnya pemilu yang inklusif dan berkeadilan untuk memperkuat legitimasi negara serta menjamin kesetaraan setiap warga negara.

Kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pemenuhan hak partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Implementasi aksesibilitas pemilu masih belum optimal, kendati tercatat 1.461 pemilih disabilitas. TPS yang seharusnya menyediakan akses khusus masih belum diterapkan, sementara persyaratan administrasi kesehatan yang tidak inklusif menghambat keterlibatan penyandang disabilitas sebagai panitia pemilu. Pelanggaran terhadap hak politik penyandang disabilitas bertentangan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rendahnya pemahaman pemilu dan tidak adanya model efektif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memperburuk keterbatasan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam proses demokrasi. Ketidakselarasan antara perspektif *bottom-up* yang inklusif dan perspektif *top-down* menyebabkan kemunduran preferensi politik penyandang disabilitas. Kondisi frustrasi dan apatisisme serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi berpotensi terjadi penolakan terhadap politik (Heywood, 2004). Preferensi politik pemilih disabilitas menunjukkan kecenderungan negatif yang berpotensi menurunkan tingkat partisipasi aktif.

Ketidakkampuan menyalurkan preferensi politik secara efektif dapat mengikis kepercayaan sistem demokrasi dan memperkuat pandangan negatif terhadap proses politik. Penyandang disabilitas pada akhirnya dapat menjadi lebih pasif atau menolak berpartisipasi, sehingga memperlebar kesenjangan antara teori dan praktik demokrasi dalam pemenuhan hak suara (Sormin, 2021). Demokrasi secara ideal seharusnya tidak hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga mampu merespons aspirasi dan kebutuhan rakyat (Puspitasari, 2004; Nuryadi & Widiatmaka, 2023). Sejak zaman filsuf klasik

telah muncul skeptisisme terhadap demokrasi karena dianggap mengabaikan nilai-nilai moral dan karakter sebagai landasan pemerintahan yang baik. Penolakan terhadap demokrasi terjadi karena landasan moralnya dianggap tidak cukup kuat (Badu, 2015). Sistem politik harus memastikan partisipasi penyandang disabilitas dan menghormati hak setiap warga negara untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.

Pandangan para pemikir klasik yang menolak demokrasi tidak dapat dibenarkan. Pelurusan paradigma terkait preferensi politik pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu nilai, persepsi, dan kecenderungan. Nilai berkaitan dengan isu-isu mendasar yang menjadi pijakan pemilih, persepsi mencerminkan pandangan pemilih terhadap proses pemilu serta kualitas kandidat, sedangkan kecenderungan menunjukkan pola partisipasi dipengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem politik (Hamim & Mahmud, 2022). Faktor preferensi politik pemilih disabilitas meliputi nilai ideologis dan identitas kelompok. Nilai ideologis membentuk orientasi politik berdasarkan latar sosial, pendidikan, agama, dan sikap politik, sedangkan identitas kelompok memperkuat ikatan solidaritas dalam menentukan pilihan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini membahas (1) preferensi politik pemilih disabilitas pada pemilihan umum, serta (2) faktor yang menentukan preferensi politik pemilih disabilitas pada pemilihan umum.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta serta karakteristik populasi tertentu (Sugiyono, 2017). Prosedur penelitian kualitatif deskriptif dilaksanakan secara sistematis melalui enam tahapan berurutan mulai dari perumusan masalah, kajian pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, serta interpretasi hasil. Prosedur berfungsi sebagai pedoman agar penelitian berjalan sesuai rencana, mengontrol kualitas data, serta menjamin validitas dan reliabilitas temuan (Arikunto, 2013). Sumber data dalam kajian ini terdiri dari data primer meliputi Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kesbangpol, serta perwakilan organisasi disabilitas dan pemilih disabilitas

Kabupaten Bone Bolango, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, laporan pemilu, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah relevan. Data primer memberikan informasi langsung dari sumber pertama untuk menjamin keaslian, sedangkan data sekunder melengkapi dan mendukung melalui dokumen atau literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Preferensi Politik Pemilih Disabilitas pada Pelaksanaan Pemilihan Umum

Preferensi erat kaitannya dengan kajian ideologi politik yang berhubungan dengan perilaku dalam pengambilan keputusan politik. Perilaku dan orientasi politik sebagai akumulasi lahir atas interpretasi nilai ideologi yang dibangun sejak awal. Preferensi politik dalam kajian ideologi dipahami sebagai hasil dari interaksi nilai, persepsi, dan kecenderungan yang membentuk sikap serta pilihan politik individu atau kelompok. Preferensi nilai menjadi dasar moral dan pedoman sosial untuk memperkuat partisipasi politik, serta berpotensi menimbulkan konflik jika nilai lebih dominan dalam sistem politik. Preferensi persepsi atas kepentingan individu atau kelompok muncul dari interpretasi nilai dalam Masyarakat, karena persepsi yang salah atau ekstrem berisiko mengganggu stabilitas demokrasi dan kepentingan umum. Preferensi kecenderungan baik logis atau tidak logis menunjukkan peran rasionalitas dan emosi dalam menentukan pilihan politik serta membentuk kualitas interaksi politik dan konsensus ideologis dalam demokrasi (Apter, 1977). Preferensi politik melalui nilai, persepsi, dan kecenderungan berperan membentuk kualitas partisipasi individu atau kelompok dalam demokrasi.

Preferensi politik merupakan kegiatan warga negara untuk memengaruhi keputusan politik berdasarkan selera dan kecenderungan masyarakat. Preferensi politik dilakukan oleh individu dalam kapasitas sebagai warga negara, bukan sebagai politisi atau pegawai negeri. Preferensi politik bersifat sukarela dan tidak

dimobilisasi oleh negara atau partai yang berkuasa. Preferensi memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama (Sormin, 2021). Preferensi politik digunakan untuk mengamati keputusan individu atau kelompok masyarakat dalam memilih seorang pemimpin, terutama melalui komunikasi selama kontestasi (Asmiyanto et al., 2021; Zhu et al., 2022; Gkartzonikas & Gkritza, 2019). Pemilih cenderung memilih kandidat atau partai yang nilainya sejalan dengan keyakinan pribadi, seperti kejujuran, keadilan, atau pandangan sosial dan ekonomi (Caprara & Zimbard, 2004). Preferensi politik diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu preferensi berakar pada sifat kepribadian mencerminkan pengaruh karakter individu terhadap pilihan politik, sedangkan preferensi yang didasarkan pada nilai pribadi menunjukkan keyakinan dan prinsip individu memengaruhi keputusan politik (Caprara et al., 2006). Preferensi politik mencerminkan pilihan yang didasarkan pada kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, serta persepsi terhadap peran seorang pemimpin.

Preferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak untuk didahulukan, meliputi prioritas, pilihan, kecenderungan, atau kesukaan. Prinsip moral, keyakinan sosial, dan nilai ekonomi membentuk preferensi politik individu atau kelompok. Preferensi politik memengaruhi pandangan individu atau kelompok terhadap berbagai isu politik. Persepsi politik adalah cara individu atau kelompok memahami informasi dan menafsirkan lingkungan politik meliputi fakta, opini publik, dan dinamika politik (Apter, 1977). Pendekatan *behavioral* yang berlandaskan empirisme, voluntarisme, tindakan individu, serta hubungan antara kesadaran dan tujuan dalam memahami perilaku politik (Syafhendry, 2016). Preferensi muncul dari tindakan logis untuk memaksimalkan manfaat serta tindakan non-logis mengekspresikan pilihan yang tidak selalu menguntungkan secara langsung (Pareto, 1983; Hamlin & Jennings, 2011). Preferensi terbentuk dari interaksi sosial, dukungan, serta penolakan terhadap nilai budaya (Wildavsky, 1987). Preferensi sebagai hasil akumulasi dari keyakinan konservatif atau progresif yang dapat memengaruhi pilihan individu, sedangkan politik menilai risiko dan manfaat dari interaksi sosial

(Basak et al., 2017). Preferensi dan politik saling memengaruhi pengambilan keputusan, baik secara individual maupun kelompok.

Preferensi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango mencerminkan pandangan, sikap, atau pilihan politik individu terhadap calon pemimpin, partai politik, dan kebijakan publik. Indikator preferensi politik pemilih disabilitas difokuskan pada nilai sebagai prinsip dasar, persepsi sebagai pandangan terhadap isu politik, kandidat, dan harapan, serta kecenderungan pilihan dipengaruhi latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman sistem politik. Preferensi nilai politik pemilih disabilitas berkaitan langsung dengan potensi konflik, karena semakin dominan nilai dalam sistem politik dapat memicu terjadinya pertikaian. Nilai bukan hanya sekadar norma atau pedoman, tetapi menjadi faktor penentu dalam dinamika sosial dan politik. Preferensi terhadap nilai yang terakumulasi di masyarakat muncul dari kesamaan dan konsensus sejak awal, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi individu dalam pemilu (Apter, 1977). Preferensi terhadap nilai dalam konteks demokrasi memiliki peran yang sangat krusial untuk membentuk partisipasi dan perilaku politik individu.

Preferensi nilai dapat membentuk perilaku politik dalam pengambilan keputusan selama berlangsungnya kontestasi politik. Perilaku pemilih ditentukan oleh akumulasi nilai sebelumnya yang berkaitan dengan karakter individu. Tingkat partisipasi politik sangat ditentukan oleh preferensi nilai politik yang diikuti individu atau kelompok. Preferensi nilai politik terbagi menjadi materialis yang menekankan kebutuhan ekonomi dan keamanan serta mendorong partisipasi politik instrumental, sedangkan post materialis mengutamakan isu sosial dan lingkungan sehingga mendorong partisipasi politik simbolik seperti aktivisme atau gerakan protes (Basak et al., 2017). Preferensi politik pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan kesenjangan signifikan antara aspirasi dan realitas proses politik. Pemilih disabilitas menempatkan nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai harapan untuk memperoleh pengakuan dan partisipasi penuh dalam pemilu. Pemilih disabilitas memandang pemilu tidak hanya sebagai momentum penggunaan hak pilih, tetapi menjadi ruang advokasi perbaikan struktural dan

kebijakan yang responsif terhadap kebutuhannya. Edukasi pemilu oleh KPU, Bawaslu, Kesbangpol, serta partai politik cenderung bersifat insidental dan hanya dilaksanakan dalam agenda politik tertentu sehingga mengecewakan pemilih disabilitas.

Disparitas antara aspirasi dan realitas mengindikasikan sistem politik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pemilih disabilitas. Edukasi pemilu yang sporadis dan berorientasi kepentingan politik jangka pendek berpotensi memicu eskalasi apatisisme politik (Nuryadi & Widiatmaka, 2023). Ketidakpuasan struktural dapat memicu ketegangan antara kelompok disabilitas dan institusi politik. Pengintegrasian nilai inklusivitas dalam praktik politik secara sistematis dibutuhkan agar pemilih disabilitas menjadi subjek aktif dalam proses pemilu. *Stereotip* bahwa penyandang disabilitas kurang rasional dalam membuat pilihan politik karena keterbatasannya mencari informasi terkait dinamika politik harus dihilangkan. Penyandang disabilitas pada realitanya memiliki kemampuan berpikir yang rasional dan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat non disabilitas. Proses pengambilan keputusan politik tidak hanya didasarkan pada tingkat kecerdasan, tetapi akumulasi nilai yang dipegang oleh individu. Kecerdasan tidak selalu menjamin rasionalitas dan keakuratan dalam penilaian (Ganzach, 2018; Reher & Evans, 2024). Kualitas preferensi politik bergantung pada keselarasan nilai serta kemampuan mengakomodasi hak individu dan kelompok yang menjadi sasaran pemilih.

Perilaku pemilih disabilitas yang tidak berpartisipasi dalam politik berkaitan dengan kekecewaan terhadap prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Kesetaraan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua individu tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Keadilan berarti memperlakukan secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus untuk menjamin aksesibilitas dan perlindungan hak pemilih disabilitas. Inklusivitas menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas selama proses pengambilan keputusan agar suara dan perspektifnya dipertimbangkan dalam kebijakan. Ketidakpuasan terhadap nilai kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas dalam politik secara signifikan memengaruhi preferensi politik penyandang disabilitas (Sackey, 2015; Schur & Adya, 2013; Hees et al., 2019; James

& Clark, 2020; Fowler et al., 2008). Pengakuan dan perlindungan hak pemilih disabilitas perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan politik yang adil serta partisipatif.

Representasi pemilih disabilitas dalam struktur politik di Kabupaten Bone Bolango yang belum memadai mengakibatkan partisipasinya hanya bersifat formalitas. Kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas setelah pemilu diabaikan oleh partai politik dan calon pemimpin yang didukung. Ketidakmampuan menyalurkan preferensi politik secara efektif berpotensi menurunkan kepercayaan penyandang disabilitas terhadap sistem demokrasi serta memicu persepsi negatif seperti apatisme dan frustrasi. Kesenjangan antara teori dan praktik demokrasi terlihat dari terbatasnya kemampuan pemilih disabilitas dalam menyalurkan pilihan politiknya (Sormin, 2021). Demokrasi tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, tetapi juga harus mampu merespons aspirasi dan kebutuhan rakyat (Puspitasari, 2004). Skeptis terhadap demokrasi muncul dari sejumlah filsuf Barat klasik karena nilai moral dan karakter dianggap lemah untuk menarik minat pemilih yang menginginkan kesetaraan hak (Badu, 2015). Nilai kesetaraan belum sepenuhnya terealisasi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga demokrasi yang dijalankan tidak menjawab aspirasi dan kebutuhan seluruh warga, khususnya penyandang disabilitas.

Persepsi politik bukan hanya respons kognitif terhadap nilai atau peristiwa tertentu, tetapi berperan dalam membentuk perilaku politik. Persepsi kepentingan politik dapat memengaruhi partisipasi individu dalam proses politik (Michalski et al., 2023; Holbrook et al., 2005). Persepsi kepentingan politik berperan penting dalam membentuk perilaku individu yang sering dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap peristiwa politik di sekitarnya. Kekhawatiran terkait pilihan politik dipandang sebagai faktor signifikan yang dapat membahayakan demokrasi. Persepsi kepentingan politik dapat mengarah pada pemilih yang kurang informasi menjadi ancaman bagi stabilitas demokrasi karena keputusannya cenderung tidak rasional serta sikap ekstrem berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan berdampak negatif pada kepentingan umum. Preferensi kepentingan politik yang didorong oleh persepsi dapat membingungkan

proses pengambilan keputusan dan merugikan kesejahteraan masyarakat (Apter, 1977). Persepsi politik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas partisipasi politik.

Persepsi individu terhadap kepentingan politik mempengaruhi tingkat keterlibatan dalam kegiatan politik serta pengambilan keputusan yang terinformasi. Persepsi politik berdasarkan pemahaman individu berpengaruh signifikan terhadap perilaku politik, terutama dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Preferensi persepsi kepentingan politik pemilih disabilitas di Kabupaten Bone Bolango terbentuk dari pengalaman langsung terhadap sistem politik yang kurang inklusif, terutama aksesibilitas fisik dan informasi. Proses politik belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas, baik dalam penyediaan fasilitas memadai di TPS atau kemudahan mengakses informasi. Persepsi buruk muncul karena minimnya sosialisasi untuk pemilih disabilitas dan perbedaan data antar lembaga penyelenggara pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (Nuryadi & Widiatmaka, 2023). Pemilih disabilitas memandang politik secara skeptis serta meragukan keseriusan pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam memenuhi haknya. Kegagalan pemerintah mengatasi masalah aksesibilitas dan janji politik yang tidak terealisasi membentuk persepsi negatif terhadap proses politik.

Kerangka hukum pemilu harus disusun secara jelas dan lengkap untuk menjamin kesetaraan. Pemilu serentak 2019 diselenggarakan sebagai bagian penting demokrasi elektoral setiap lima tahun dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengonsolidasikan berbagai peraturan sebelumnya (Asy'Ari, 2021). Setiap warga negara memiliki hak setara untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi dan mekanisme rekrutmen politik yang demokratis memastikan calon wakil rakyat dipilih secara terbuka serta adil. Pemilih juga harus memiliki kebebasan berdiskusi, mengakses informasi, dan menentukan pilihan tanpa tekanan (Saihu dkk., 2015). Keberadaan komite pemilihan yang independen serta netralitas birokrasi sangat penting untuk menjamin transparansi, keadilan, dan kesempatan setara bagi semua peserta pemilu.

Kritik terhadap pemilu demokratis menjadi bahan revaluasi model pemilu ideal terutama bagi pemilih marginal. Pemilu menjadi instrumen fleksibel dalam mendukung demokrasi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar demokrasi (Pamungkas, 2009). Pengelolaan pemilu demokratis menekankan dua aspek penting yaitu integritas pemilu yang inklusif serta prinsip dasar pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Surya dkk., 2023). Dinamika preferensi persepsi politik disabilitas di Kabupaten Bone Bolango dijadikan dasar untuk memaksimalkan pemilu sebagai sarana pemenuhan hak warga negara. Sistem politik demokratis mencakup empat aspek utama, meliputi pejabat terpilih memegang kontrol konstitusional atas kebijakan, pejabat dipilih dan diganti secara damai melalui pemilu berkala, semua warga negara memiliki hak untuk memberikan suara, serta berhak mencalonkan diri dalam jabatan publik (Puspitasari, 2004). Keempat aspek sistem politik demokratis menjadi landasan penting untuk memahami demokrasi yang inklusif, bebas, dan adil.

Persepsi kepentingan politik berkaitan dengan sistem politik terbuka dan inklusif yang memfasilitasi partisipasi seluruh warga negara, termasuk pemilih disabilitas. Preferensi politik terbentuk dari persepsi pemilih disabilitas terhadap tingkat inklusivitas dan keadilan sistem dalam menjamin akses untuk memilih, mencalonkan diri, serta berpartisipasi pengambilan keputusan politik. Penyandang disabilitas jika merasa diabaikan oleh kebijakan yang tidak inklusif dapat memengaruhi preferensi politik dan partisipasi dalam pemilu. Hubungan antara kepentingan pribadi dan tindakan politik terjadi melalui dua cara, yaitu ketidakadilan mendorong individu untuk melakukan perlawanan politik serta nilai-nilai fundamental individu menjadi pedoman tindakan politik (Modigliani & Gamson, 1979; Miller et al., 1981). Kesadaran bahwa ketidakadilan kelompok dan perampasan status yang berasal dari sistem sosial atau politik mendorong tindakan politik untuk melawan ketidaksetaraan.

Preferensi kecenderungan politik dipahami sebagai pola dalam hierarki kepercayaan individu yang dipengaruhi oleh akumulasi nilai dan persepsi politik. Kecenderungan politik adalah sikap, norma, dan proses refleksi yang memengaruhi isu politik. Interaksi antara sikap tegas dalam

mempertahankan kecenderungan serta proses akomodasi nilai dan kepentingan menjadi relevan. Kecenderungan politik jika bersifat pasif dapat menghambat proses interaksi dan memengaruhi hasil dari dinamika politik (Apter, 1977). Nilai buruk berdampak pada persepsi negatif dan membentuk kecenderungan politik yang tidak kondusif. Pola partisipasi politik yang tidak ideal dalam konteks negara demokrasi terlihat jelas pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango. Tingkat partisipasi politik belum mencapai target yang ditetapkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Data pemilih disabilitas tersebar di 18 kecamatan dengan rincian tertinggi di Kecamatan Kabila sejumlah 215 pemilih dan terendah Kecamatan Pinogu sejumlah 13 pemilih, sedangkan kecamatan lain seperti Bonepantai 166 pemilih, Bone 98 pemilih, serta Bone Raya 96 pemilih. Partisipasi pemilih disabilitas tergolong rendah, karena dari 1.450 pemilih, hanya 650 orang atau 36% yang menggunakan hak pilihnya. Rendahnya tingkat partisipasi mencerminkan kecenderungan politik pasif di kalangan pemilih disabilitas.

Kelompok disabilitas yang tidak berpartisipasi dalam pemilu mengalami ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama, tetapi sering menghadapi berbagai hambatan yang menyulitkan partisipasinya (Atkinson et al., 2017). Hambatan seperti aksesibilitas fisik, kurangnya informasi yang memadai, dan stigma sosial dapat mempengaruhi persepsi dan nilai penyandang disabilitas tentang pentingnya berpartisipasi. Kecenderungan politik pasif yang mendominasi, membuat pemilih disabilitas merasa tidak memiliki pengaruh dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kecenderungan politik pasif tidak hanya menghambat proses interaksi dan akomodasi nilai serta kepentingan, tetapi juga memengaruhi hasil dari dinamika politik yang berlangsung (Apter, 1977). Preferensi politik yang pasif tidak hanya mencerminkan kurangnya keterlibatan dalam politik, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan untuk mencapai kesepakatan sistem demokrasi khususnya bagi penyandang disabilitas.

Negara Indonesia telah meratifikasi undang-undang tentang disabilitas dan kesetaraan, tetapi penerapannya masih menghadapi hambatan kurangnya pendidikan, stigma sosial, serta infrastruktur yang tidak aksesibel. Masalah

kurangnya aksesibilitas fisik di TPS, tidak tersedianya alat bantu, serta minimnya dukungan membuat pemilih disabilitas membutuhkan bantuan orang lain yang dapat mengancam kerahasiaan suaranya (Matsubayashi & Ueda, 2014; Ward et al., 2009; Shittu, 2024). Penyandang disabilitas cenderung jarang memilih kendati memiliki preferensi politik tertentu seperti dukungan terhadap peran pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan (Schur & Adya, 2013). Penyandang disabilitas lebih sering menggunakan metode pemungutan suara melalui surat, sementara reformasi pemungutan suara langsung hanya memberikan dampak marjinal (Miller & Powell, 2016). Penyandang disabilitas juga menghadapi tantangan psikologis akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap aksesibilitas (DuHaime, 2022; Femec et al., 2017). Persoalan disposisi hak disabilitas dalam pemilu dipandang sebagai pemicu penurunan partisipasi politik pemilih disabilitas (Rabitsch et al., 2023). Upaya meningkatkan kesempatan memilih bagi penyandang disabilitas harus dilakukan tanpa memandang jenis disabilitas, usia, dan gender.

### **Faktor Preferensi Politik Pemilih Disabilitas pada Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Indikator preferensi politik dalam pendekatan psikologis meliputi nilai ideologis dan identitas kelompok. Pendekatan psikologis digunakan untuk memahami cara individu menentukan pilihan politik (Hamim & Mahmud, 2022). Faktor nilai ideologis meliputi status sosial, kelas politik, tingkat pendidikan, sikap politik, dan afiliasi keagamaan yang mendorong individu mendukung kebijakan atau kandidat sesuai keinginannya. Perbedaan dapat muncul antara individu radikal yang progresif dengan individu konservatif memprioritaskan stabilitas dan mempertahankan nilai tradisional. Faktor identitas kelompok berfungsi sebagai acuan kolektif dalam mengarahkan keputusan politik agar sejalan dengan norma, tujuan, dan solidaritas kelompok. Identitas kelompok berperan dalam memperkuat integrasi sosial, meningkatkan partisipasi politik, dan menjaga stabilitas keputusan politik, kendati dapat membatasi fleksibilitas individu menanggapi perubahan progresif (Eysenck, 1963). Preferensi politik individu terbentuk dari kombinasi nilai ideologis dan identitas kelompok yang saling memengaruhi.

Variabel struktural seperti diskusi politik,

interaksi partai, jaringan kelas sosial, dan posisi dalam struktur sosial juga menjadi faktor fundamental yang membentuk serta menstabilkan preferensi politik individu secara berkelanjutan. Faktor fundamental preferensi politik memengaruhi loyalitas pemilih terhadap partai, posisi ideologis, dan konsistensi pandangan kebijakan, kendati dipengaruhi variabel seperti identifikasi partai, sosialisasi politik, usia, serta tingkat pendidikan (Zuckerman et al., 1998). Determinan preferensi politik dari perspektif berbeda mencakup konsistensi afiliasi partai yang lebih kuat dibandingkan sikap terhadap kebijakan, pengaruh format pertanyaan survei terhadap hasil, serta perbedaan ketahanan dan konsistensi sikap politik antar individu. Karakteristik personal dan konteks sosial juga memainkan peran signifikan dalam membentuk preferensi politik (Krosnick, 1981). Preferensi politik individu terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor struktural, karakteristik personal, dan sosial.

Determinan preferensi politik yang mencakup status sosial dan ekonomi, meliputi tingkat pendapatan dan pendidikan, serta identitas kelompok seperti afiliasi etnis dan agama. Pengalaman dan sosialisasi politik individu, termasuk pengaruh keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam pembentukan preferensi politik. Persepsi terhadap manfaat dan dampak kebijakan dapat memengaruhi pandangan politik seseorang. Faktor kepastian dan tingkat risiko sangat berpengaruh karena individu dengan pendapatan tidak tetap cenderung mendukung kebijakan redistributif, sedangkan yang berpendapatan stabil lebih memilih kebijakan pasar bebas. Interaksi sosial dalam jaringan diskusi politik turut membentuk kompleksitas preferensi politik individu (Kitschelt & Rehm, 2006). Preferensi politik individu juga dapat dibentuk melalui interaksi antara kualitas dan perilaku pencarian informasi (Vössing & Weber, 2019). Preferensi politik individu dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, identitas, pengalaman, dan cara memperoleh informasi yang menentukan kekuatan pandangan politiknya.

Preferensi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Bone Bolango pada Pemilu 2024 dianalisis melalui nilai ideologis dan identitas kelompok. Nilai ideologis menekankan hubungan antara status sosial, kelas politik, tingkat pendidikan, sikap politik, dan afiliasi keagamaan dengan

kecenderungan pilihan suara individu. Faktor nilai ideologis memiliki keterkaitan dengan cara seseorang dalam mengambil keputusan politik. Tipe kepribadian politik mencakup kecenderungan radikal dan konservatif, serta pola pemikiran yang kuat atau lemah. Kepribadian seseorang dapat memengaruhi preferensi politik dengan menunjukkan karakteristik tertentu dalam pandangan atau tindakan politik (Eysenck, 1963). Nilai ideologis memainkan peran fundamental dalam membentuk preferensi politik individu. Nilai ideologis berfungsi sebagai panduan yang memengaruhi sikap dan keputusan politik (Virendrakumar et al., 2018). Nilai ideologis mencerminkan keyakinan mendasar individu atau kelompok tentang tata kelola masyarakat yang ideal, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan peran pemerintah.

Preferensi politik pemilih disabilitas dalam konteks nilai ideologis sangat dipengaruhi oleh intervensi keluarga, khususnya dari orang tua atau kerabat. Petugas pemilu telah memberikan kesempatan bagi pemilih disabilitas untuk memilih pendamping di bilik suara, tetapi dalam praktiknya pendamping sering ditentukan oleh anggota keluarga. Fenomena intervensi memperkuat temuan bahwa preferensi politik pemilih disabilitas bukan hasil pertimbangan pribadi, tetapi dipengaruhi oleh nilai ideologis dalam keluarga (Hamim & Mahmud, 2022). Nilai ideologis sebagai “doktrin keluarga” tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari pemilih disabilitas. Proses yang telah membudaya secara sosial dan kultural menyebabkan pemilih disabilitas kehilangan otonomi dalam menentukan pilihan politik. Pengaruh “doktrin keluarga” membuat pemilih disabilitas tidak memiliki ruang untuk membuat keputusan politik secara mandiri. Pemilih disabilitas menganggap partisipasi politiknya tidak bermakna dan enggan datang ke TPS karena merasa hasil pemilu tidak akan membawa perubahan dalam hidupnya.

Faktor sosial seperti intervensi keluarga berkaitan dengan tipe kepribadian radikal atau konservatif dan pemikiran kuat atau lemah. Preferensi politik pemilih disabilitas yang berada dibawah pengaruh “doktrin keluarga” dikategorikan dalam kelompok dengan pemikiran lemah. Pemilih disabilitas cenderung mengikuti pilihan politik lingkungan sosial tanpa analisis kritis atau independen, sehingga menunjukkan

bahwa preferensi politik lebih dipengaruhi oleh keluarga dan komunitas. Nilai ideologis yang terbentuk dari tradisi keluarga bersifat konservatif, karena pemilih disabilitas mengikuti pola politik lama dan tidak bersikap progresif. Kepribadian konservatif lebih menghargai stabilitas dan penerimaan terhadap *status quo*, serta menunjukkan keengganan terhadap perubahan drastis (Kharima, 2016). Kelompok disabilitas yang lebih kritis dan potensial bersifat radikal dapat mendorong kesetaraan hak politik dan inklusivitas sebagai wujud pemikiran progresif. Kelompok disabilitas yang kritis menunjukkan kemandirian politik dan memiliki motivasi kuat untuk menentang intervensi keluarga atau struktur sosial.

Fenomena *stereotip* yang menempatkan penyandang disabilitas hanya sebagai penerima layanan publik, bukan sebagai partisipan aktif dalam proses politik dapat memperlemah nilai ideologis dan memicu ketidakaktifan menggunakan hak politik. Nilai ideologi yang terbentuk sejak dini dipengaruhi oleh keluarga melalui transmisi nilai dan pengalaman hidup (Rohwerder, 2018; Friedman & Scotch, 2017). Kelemahan dalam preferensi nilai ideologis terlihat dari sosialisasi pendidikan politik masih bersifat vertikal pada struktur masyarakat perkotaan dan belum menjangkau aspek horizontal di pedesaan. Proses pendidikan politik secara vertikal hanya terjadi dalam lingkup organisasi dan tidak menjangkau individu yang tidak terafiliasi dengan organisasi disabilitas. Sosialisasi politik pada tingkat horizontal di pedesaan belum diimplementasikan untuk penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil. Realitas sosialisasi pendidikan politik yang tidak optimal diperkuat oleh kecenderungan ideologi politik yang lemah dan minimnya media informasi bagi penyandang disabilitas. Penyelenggara pemilu dan partai politik belum mampu menyediakan sumber informasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pemahaman hak politik. Rendahnya aksesibilitas terhadap informasi politik tidak hanya menghambat pengetahuan pemilih disabilitas, tetapi juga mengurangi partisipasinya dalam pengambilan keputusan politik.

Ketidakhahaman dan keterbatasan akses informasi berdampak negatif dengan memperkuat ketidakaktifan politik serta menurunkan

kualitas preferensi ideologis penyandang disabilitas. Informasi yang diterima oleh responden berpandangan politik konservatif dapat memperkuat pengaruh ideologi dan menurunkan tingkat kekhawatiran (Sarathchandra & Johnson-Leung, 2024) vaccines remain a major public health strategy for mitigating the effects of COVID-19. Yet, vaccine intake has been affected by various cognitive and cultural factors. We examine how a selected set of factors (i.e., knowledge, concern, media, peer influence, and demographics). Media memiliki potensi strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi politik bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan konten aksesibel, narasi inklusif, dan pengembangan *platform* diskusi partisipatif. Media dalam praktiknya sering gagal menjalankan perannya sebagai jembatan informasi karena kurang aksesibilitas pada konten berita dan *platform* digital. Ketidakefektifan peran media memperkuat marginalisasi ganda penyandang disabilitas baik sebagai konsumen informasi maupun partisipan politik, sehingga dapat mengakibatkan kesenjangan partisipasi politik (Hoewe & Peacock, 2020). Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi langkah penting untuk mewujudkan partisipasi politik yang setara dan inklusif.

Preferensi politik juga dianalisis melalui faktor identitas kelompok yang memengaruhi proses pengambilan keputusan kolektif mengikuti dinamika sosial internal berdasarkan solidaritas dan pengalaman bersama (Eysenck, 1963). Keputusan politik dalam pemilu dipengaruhi oleh kekuatan suara kelompok sosial yang mampu mengorganisir dan menyebarkan informasi politik secara efektif kepada anggotanya (Cohen, 2003; Terwel et al., 2010). Keterkaitan teori identitas kelompok dengan realitas pemilih disabilitas di Kabupaten Bone Bolango terbentuk dari pengalaman kolektif menghadapi diskriminasi dan hambatan aksesibilitas yang menciptakan dinamika politik tersendiri. Solidaritas komunitas mendorong preferensi politik terhadap calon atau partai yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas, sedangkan norma dominan dalam organisasi disabilitas justru dapat menekan partisipasi yang terlihat hanya 650 dari 1.450 pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya. Informasi politik dalam kelompok disabilitas sering menimbulkan prasangka tentang kesulitan

merealisasikan hak politik, sedangkan tekanan sosial, pengaruh teman sebaya, dan ekspektasi kelompok berperan membentuk opini publik serta perilaku politik. Partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh faktor individu tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok.

Identitas kelompok disabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan politik. Kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu sering dipicu oleh informasi politik yang diterima kelompok disabilitas. Persepsi kolektif jika menganggap pemilu tidak memberikan manfaat substantif, maka tekanan sosial serta pengaruh teman sebaya memperkuat sikap pasif penyandang disabilitas. Identitas kelompok yang tidak diimbangi dengan preferensi politik kuat dan independen berpotensi menurunkan partisipasi penyandang disabilitas serta mengakibatkan kesenjangan proses demokrasi. Identitas kelompok menjadi landasan bagi individu dalam memahami hak politik dan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Anggota kelompok disabilitas yang merasa identitasnya terabaikan justru termotivasi untuk menuntut perubahan. Aksesibilitas pemilu dipengaruhi oleh cara penyandang disabilitas memposisikan diri sebagai bagian dari kelompok terpinggirkan. Persoalan belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas dapat berkembang dari isu pribadi menjadi gerakan kolektif untuk melakukan intervensi dalam sistem politik (Matsubayashi & Ueda, 2014). Identitas kelompok disabilitas berperan penting dalam mendorong perubahan dalam sistem demokrasi.

Kurangnya aksesibilitas informasi tentang prosedur pemilu menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Sinergitas kelompok disabilitas harus dilakukan untuk mendorong pemerintah dan institusi pemilu menyediakan informasi lebih transparan dan mudah diakses. Kesadaran kolektif mendorong tindakan politik dengan identitas kelompok berfungsi sebagai katalis untuk mendorong intervensi (Ward et al., 2009). Stigma negatif membuat penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dalam proses pemilu. Identitas kelompok membantu menciptakan solidaritas dan motivasi untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Persatuan kelompok disabilitas dapat menekan pengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi yang ada (Shittu, 2024). Persatuan dan kesadaran kolektif kelompok disabilitas

menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi dan memperjuangkan hak politiknya.

Penyandang disabilitas memiliki preferensi politik yang jelas, tetapi sering terhambat dalam mengekspresikan hak suaranya. Intervensi dalam bentuk advokasi politik dan kebijakan yang lebih inklusif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Pengakuan terhadap identitas kelompok dapat menjadi pendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemilih disabilitas (Schur & Adya, 2013). Penyandang disabilitas yang cenderung menggunakan metode pemungutan suara melalui pos mengindikasikan kebutuhan untuk memperbaiki aksesibilitas dalam proses pemilu. Identitas kelompok berfungsi sebagai alat untuk menuntut reformasi yang lebih besar dalam sistem pemungutan suara (Miller & Powell, 2016). Kurangnya perhatian pemerintah terhadap aksesibilitas menciptakan tantangan psikologis yang menghambat partisipasi politik penyandang disabilitas. Identitas kelompok tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga membentuk kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas (DuHaime, 2022). Identitas kelompok penyandang disabilitas berperan sebagai pendorong intervensi dalam pengambilan keputusan politik. Pemenuhan hak bagi kelompok disabilitas dapat meningkatkan partisipasinya dalam proses politik, sehingga berdampak positif terhadap kebijakan.

Preferensi politik pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango terbentuk melalui interaksi antara dimensi nilai, persepsi, dan kecenderungan dengan faktor penentu berupa nilai ideologis serta identitas kelompok. Perhatian utama pemilih disabilitas pada aspek nilai tercermin dalam isu keamanan, keadilan, inklusivitas publik, aksesibilitas, dan partisipasi warga yang mempengaruhi pilihan politik. Persepsi dibangun melalui pengalaman langsung serta interaksi sosial yang melahirkan penilaian rasional serta emosional terhadap proses politik. Kecenderungan politik memperlihatkan pola partisipasi aktif maupun pasif yang dipengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem demokrasi (Andriani & Amsari, 2021). Nilai ideologis terkait kelas sosial, pendidikan, afiliasi keagamaan, dan sikap politik menjadi arah orientasi individu. Identitas kelompok yang mencakup keluarga, gender, keterikatan,

dan organisasi memperkuat solidaritas kolektif dalam pengambilan keputusan. Preferensi politik pemilih disabilitas terbentuk dari interaksi faktor internal dan eksternal yang secara bersamaan mempengaruhi sikap, orientasi, dan partisipasi politik penyandang disabilitas.

## SIMPULAN

Preferensi politik pemilih disabilitas terbentuk dari kombinasi antara dimensi internal dan eksternal. Preferensi politik lahir dari nilai sebagai dasar, persepsi dibentuk melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan politik, serta kecenderungan tercermin dalam pola partisipasi dan kepuasan terhadap mekanisme demokrasi. Preferensi politik memberi warna pada cara pemilih disabilitas memandang isu publik, menilai kandidat, dan menentukan sikap politiknya. Faktor preferensi politik pemilih disabilitas dipengaruhi oleh nilai ideologis terbentuk dari latar belakang pendidikan, kelas sosial, dan afiliasi keagamaan, sedangkan identitas kelompok berperan memperkuat solidaritas, membentuk rasa keterikatan, dan mengarahkan pilihan politik sesuai kepentingan bersama. Faktor penentu preferensi politik saling melengkapi dan memengaruhi pandangan individu terutama bagi penyandang disabilitas. Preferensi politik pemilih disabilitas bukan sekadar pilihan personal, melainkan hasil interaksi antara nilai, persepsi, dan kecenderungan yang dipengaruhi oleh faktor nilai ideologis serta identitas kelompok untuk meneguhkan orientasi politik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777-798.
- Apter, D. A. (1977). *Introduction to Political Analysis*. Cambridge: Winthrop Publishers.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmiyanto, T., Ferezagia, D. V., Inamullah, M. H., Abdurrahman, Z., & Roselina, E. (2021). The Effect of Information-Seeking Behavior on Gen-Z Political Preference: Study on 2020 District Heads Election in Depok and South Tangerang. *Library Philosophy and Practice*, 2(1), 1-17.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas

- Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41.
- Asy'ari, A. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Atkinson, V., Aaberg, R., & Darnolf, S. (2017). Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process. *Nordic Journal of Human Rights*, 35(4), 375-391.
- Badu, M. N. (2015). Democracy and The United States of America. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 9-22.
- Basak, R., Aydin, D., Erdem, C., & Mekik, K. (2017). A Study of Relationships Between Worldview, Political Orientation and Art Preferences. *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*, 3(5), 16-22.
- Caprara, G. V., Schwartz, S., Capanna, C., Vecchione, M., & Barbaranelli, C. (2006). Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice. *Political Psychology*, 27(1), 1-28.
- Caprara, G. V., & Zimbard, G. (2004). Personalizing Politics: A Congruency Model of Political Preference. *American Psychologist*, 59(7), 581-594.
- Cohen, G. L. (2003). Party Over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political Beliefs. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(5), 808-822.
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 6(1), 14-28.
- DuHaime, C. (2022). Barriers to Voting for Disabled Americans. *Journal of Student Research*, 11(3), 8-12.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(1), 29-50.
- Eysenck, H. J. (1963). *The Psychology Of Politics (4th ed)*. Oxfordshire: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Femec, L., Kiš-Glavaš, L., & Mašić, V. (2017). Voting Opportunities for Persons with Disabilities. *Rvatska Revija Za Rehabilitacijska Istraživanja*, 53(1), 1-14.
- Fong, C., Malhotra, N., & Margalit, Y. (2019). Political Legacies: Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates. *Political Science and Politics*, 52(3), 451-456.
- Fowler, J. H., Heaney, M. T., Nickerson, D. W., Padgett, J. F., & Sinclair, B. (2008). American Politics Research. *American Politics Research*, 39(2), 437-480.
- Friedman, S., & Scotch, R. K. (2017). Politicians with Disabilities: Challenges and Choices. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 105(6), 1-21.
- Ganzach, Y. (2018). Intelligence and The Rationality of Political Preferences. *Intelligence*, 69(8), 59-70.
- Gkartzonikas, C., & Gkritza, K. (2019). What Have We Learned? A Review of Stated Preference and Choice Studies on Autonomous Vehicles. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 98(1), 323-337.
- Hamim, U., & Mahmud, R. (2022). Penguatan Perilaku Salbihyah sebagai Alternatif Perilaku Rasional Birokrasi pada Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 757-765.
- Hamlin, A., & Jennings, C. (2011). Expressive Political Behaviour: Foundations, Scope and Implications. *British Journal of Political Science*, 41(3), 645-670.
- Hees, S. G. M. V., Boeije, H. R., & Putter, I. D. (2019). Voting Barriers and Solutions: The Experiences of People with Disabilities During The Dutch National Election in 2017. *Disability and Society*, 34(5), 819-836.
- Heywood, A. (2004). *Political Theory: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Hoewe, J., & Peacock, C. (2020). The Power of Media in Shaping Political Attitudes. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 34(8), 19-24.
- Holbrook, A. L., Berent, M. K., Krosnick, J. A., Visser, P. S., & Boninger, D. S. (2005). Attitude Importance and The Accumulation of Attitude-Relevant Knowledge in Memory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88(5), 749-769.
- James, T. S., & Clark, A. (2020). Electoral

- Integrity, Voter Fraud and Voter ID in Polling Stations: Lessons from English Local Elections. *Policy Studies*, 41(2), 190-209.
- Kharima, N. (2016). Problematika Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 34-44.
- Kitschelt, H., & Rehm, P. (2006). *The Politics of Post-Industrial Welfare States* Britania Raya: Routledge.
- Krosnick, J. A. (1981). The Stability of Political Preferences: Comparisons of Symbolic and Nonsymbolic Attitudes. *American Journal of Political Science*, 35(3), 547-576.
- Lasswell, H. D. (1963). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: McGraw-Hill.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78-87.
- Mariana, D. (2009). *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal Indonesia*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2014). Disability and Voting. *Disability and Health Journal*, 7(3), 6-11.
- Michalski, P., Marchlewska, M., Szczepańska, D., Rogoza, M., & Molenda, Z. (2023). When Politics Affects the Self: High Political Influence Perception Predicts Civic and Political Participation. *Journal of Social and Political Psychology*, 11(2), 516-533.
- Miller, A. H., Gurin, P., Gurin, G., & Malanchuk, O. (1981). Group Consciousness and Political Participation. *American Journal of Political Science*, 25(3), 494-511.
- Miller, P., & Powell, S. (2016). American Politics Research. *American Politics Research*, 44(1), 28-55.
- Modigliani, A., & Gamson, W. A. (1979). Thinking about Politics. *Political Behavior*, 1(1), 5-30.
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik sebagai Upaya untuk Mengantisipasi Maraknya Politik Identitas pada Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 108-116.
- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pareto, V. (1983). *The Mind and Society: a Treatise on General Sociology*. New York: Dover.
- Puspitasari, S. H. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(25), 135-148.
- Rabitsch, A., Moledo, A., & Lidauer, M. (2023). Inclusive Elections? The Case of Persons with Disabilities in the European Union. *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 535-553.
- Reher, S., & Evans, E. (2024). Someone Like Me? Disability Identity and Representation Perceptions. *Political Behavior*, 1-21.
- Ridlwani, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141-152.
- Rohwerder, B. (2018). Disability Stigma in Developing Countries. *K4D Helpdesk Report Brighton UK*, Page 1-26.
- Roskin, M. G. (2025). Enduring Debates in Political Science. *Political Science*, page 1-14.
- Sackey, E. (2015). Disability and Political Participation in Ghana: An Alternative Perspective. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 17(4), 366-381.
- Saihu, M., Suha, A. M., Yasin, R., Nugroho, T. A., Yanuar, F., Budiman, A., & Sarwani, A. (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 127-156.
- Sarathchandra, D., & Johnson-Leung, J. (2024). How Political Ideology and Media Shaped Vaccination Intention in the Early Stages of the COVID-19 Pandemic in the United States. *Covid*, 4(5), 658-671.
- Schur, L., & Adya, M. (2013b). Sidelined or Mainstreamed? Political Participation and Attitudes of People with Disabilities in the United States. *Social Science Quarterly*,

- 94(3), 811-839.
- Shittu, A. K. (2024). Do Disabled People Also Vote? Electoral Frameworks and Voting Participation in Nigeria's 2019 Elections. *Disability & Society, 39*(4), 1-5.
- Sormin, I. (2021). *Preferensi Politik pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan*. Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, A., dkk. (2023). *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Syafhendry. (2016). *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Terwel, B. W., Harinck, F., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2010). Voice in Political Decision-Making: The Effect of Group Voice on Perceived Trustworthiness of Decision Makers and Subsequent Acceptance of Decisions. *Journal of Experimental Psychology: Applied, 16*(2), 173-186.
- Virendrakumar, B., Jolley, E., Badu, E., & Schmidt, E. (2018). Disability Inclusive Elections in Africa: A Systematic Review of Published and Unpublished Literature. *Disability and Society, 33*(4), 509-538.
- Vössing, K., & Weber, T. (2019). Information Behavior and Political Preferences. *British Journal of Political Science, 49*(2), 533-556.
- Ward, A., Baker, P. M. A., & Moon, N. W. (2009). Ensuring the Enfranchisement of People with Disabilities. *Journal of Disability Policy Studies, 20*(2), 79-92.
- Widnyani, I. A. P. S. (2020). *Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Wildavsky, A. (1987). Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation. *American Political Science Review, 81*(1), 3-21.
- Zhu, N., Chen, B. Bin, Lu, H. J., & Chang, L. (2022). Life-History Calibration of Social Hierarchies: Childhood Adversity Predicts Leadership Preference Through Relational Social Investment. *Personality and Individual Differences, 188*, 1-11.
- Zuckerman, A. S., Kotler-Berkowitz, L. A., & Swaine, L. A. (1998). Anchoring Political Preferences: The Structural Bases of Stable Electoral Decisions and Political Attitudes in Britain. *European Journal of Political Research, 33*(3), 285-321.